

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

DAFTAR PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
1.	Aceh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
4.	Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
5.	Jambi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
11.	D.I Yogyakarta	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
12.	Kalimantan Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
		Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
13.	Kalimantan Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Kalimantan Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
15.	Kalimantan Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
16.	Kalimantan Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
17.	Banten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
18.	Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
19.	Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
20.	Sulawesi Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
21.	Gorontalo	Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
22.	Sulawesi Tenggara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Sulawesi Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Sulawesi Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
25.	Sulawesi Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat
26.	Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
27.	Bali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
28.	Nusa Tenggara Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat
29.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
30.	Maluku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
31.	Maluku Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
		Satu Pintu Provinsi Maluku Utara
32.	Papua Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat
33.	Papua	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT PROFIL PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI
 KE LOKASI PROYEK

Periode Laporan: Bulan ... Tahun ...

Nama Perusahaan (1)	:			
Lokasi Proyek (2)	:			
Bidang Usaha (3)	:			
NIB/Izin Proyek yang dikunjungi (4)	:			
Nilai Rencana Investasi (5)	:			
Nilai Realisasi Investasi (6)	:			
Tenaga Kerja	:	Tenaga Kerja	Rencana	Realisasi
		TKI	.. (7)	.. (8)
		TKA	.. (9)	.. (10)
		Total	.. (11)	.. (12)
Jenis/Kapasitas Produksi	:	Jenis	Kapasitas	Satuan
		(13)	(14)	(15)
	
Luas Area	:	Ha/M ² (16)		
Rencana Ekspor	:	Negara Tujuan	Nilai Ekspor	Produk
		.. (17)	.. (18)	.. (19)
Kebutuhan Listrik	:	PLN... MW (20) Pembangkit sendiri/selain PLN (bila ada)... MW (21) Surplus/dijual ke PLN... MW (22)		
Pemenuhan Komitmen atas Izin Usaha	:	a. Izin Mendirikan Bangunan; b. Izin Lokasi; c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL; d. Lain-lain (Misalnya SLF); (23)		
Progres	:	Selesai/Masih Produksi (... %) (24)		

Rencana Produksi Komersial	:	... (25)
Progress Permasalahan/ Kendala Perusahaan	:	... (26)

Foto- Foto Proyek (27)

PETUNJUK PENGISIAN PROFIL PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI KE
LOKASI PROYEK

No	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama perusahaan yang dikunjungi ke lokasi proyeknya.
(2)	Diisi dengan alamat lokasi proyek perusahaan.
(3)	Diisi dengan bidang usaha proyek yang dikunjungi.
(4)	Diisi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau izin proyek yang dikunjungi.
(5)	Diisi dengan nilai rencana investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar.
(6)	Diisi dengan nilai realisasi investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar hingga saat kunjungan dilakukan.
(7)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI.
(8)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI.
(9)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKA.
(10)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKA.
(11)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 7 dan 9).
(12)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 8 dan 10).
(13)	Diisi dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
(14)	Diisi dengan nilai kapasitas produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
(15)	Diisi dengan satuan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (misal: ton, liter, buah, kamar).
(16)	Diisi dengan luas area lokasi proyek perusahaan dalam satuan hektar atau meter ² .
(17)	Diisi dengan negara tujuan ekspor produk perusahaan.
(18)	Diisi dengan rencana nilai ekspor hasil produksi perusahaan.
(19)	Diisi dengan hasil produksi yang akan diekspor oleh perusahaan.
(20)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh PLN.
(21)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik milik sendiri atau genset.
(22)	Diisi dengan nilai kelebihan listrik yang dihasilkan perusahaan.
(23)	Diisi dengan nomor, tanggal, dan penerbit perizinan teknis.
(24)	Diisi dengan prosentase perkembangan realisasi investasi terhadap rencana investasi.
(25)	Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan berencana memulai berproduksi komersial.

No	URAIAN ISI
(26)	Diisi dengan uraian perkembangan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya.
(27)	Diisi dengan foto – foto hasil kunjungan ke lokasi proyek yang terdiri atas: foto lahan proyek, foto bangunan, foto mesin, dan foto hasil produksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

FORMAT LAPORAN MANAJERIAL

Periode Laporan: Bulan ... Tahun ...

No	Nama Perusahaan	Lokasi Proyek (Kab/Kota, Provinsi)	Rencana Investasi	Realisasi Investasi	Realisasi		Permasalahan Perusahaan	Usulan Tindak Lanjut	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Menyelesaikan Masalah
					TKI	TKA			

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG
 PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

Periode : Bulan ... Tahun ...

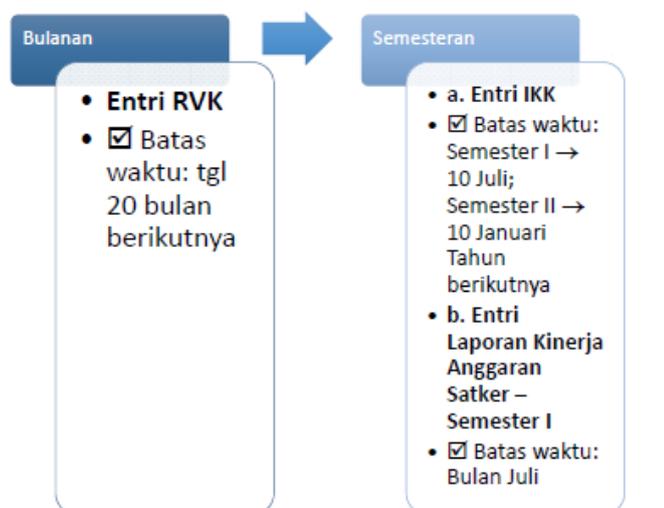
Nama Output	Anggaran					Output					Penjelasan
	Pagu	Realisasi Bulan	Persen	Total Realisasi Sampai Bulan	Persen	Target	Realisasi Bulan	Persen	Total Realisasi Sampai Bulan	Persen	Realisasi Bulan
	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)	(volume)	(volume)	(%)	(volume)	(%)	(Proyek)
3229.061											
Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal											1. PT. A 2. PT. B 3. PT. C dst

PETUNJUK PENGISIAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU KEMENTERIAN KEUANGAN

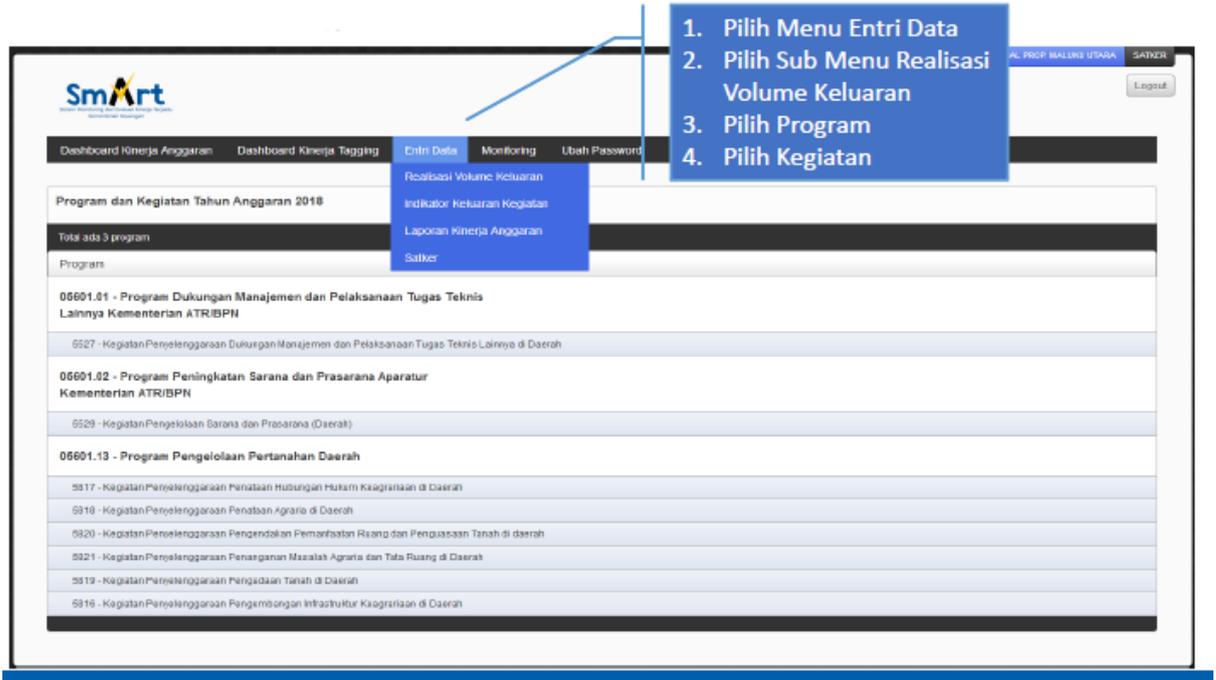
1. Menginput data laporan kinerja anggaran pada aplikasi SMART;
2. Aplikasi SMART dapat diakses melalui tautan <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/>;
3. Pengguna dapat login dengan cara mengklik tombol “login” di halaman depan menggunakan username dan password masing-masing;



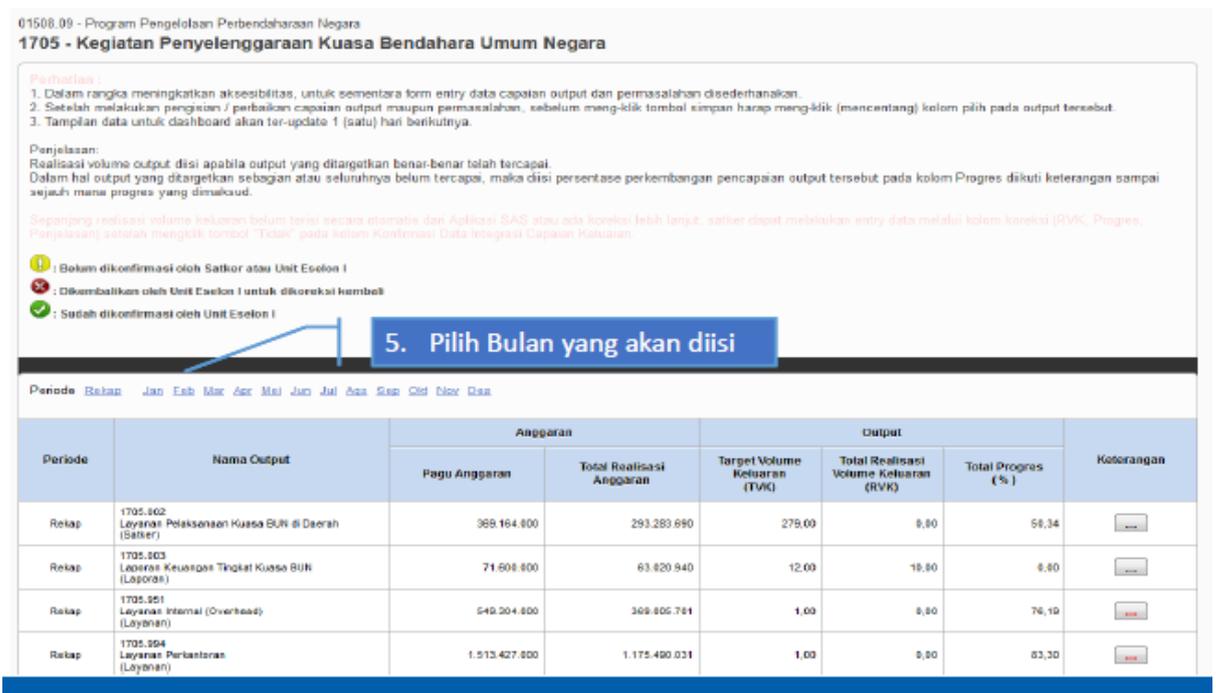
4. Pengguna mengisi entri Realisasi Volume Keluaran (RVK) setiap bulan dan Indikator Keluaran Kegiatan (IKK) setiap semester;



5. Untuk mengisi RVK, pengguna mengklik menu "Entri Data" (panel atas), pilih sub menu Realisasi Volume Keluaran pada drop down list, lalu pilih program dan kegiatan yang sesuai;



6. Pengguna memilih bulan pelaporan yang akan diisi.



7. Pengguna mengisi capaian keluaran.

6. Lihat Kolom Data Integrasi Capaian Keluaran
7. Pilih Setuju atau Tidak di kolom "Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran"
8. Jika dipilih "Tidak", silahkan isi Kolom Koreksi (Koreksi RVK, Koreksi Progress, dan Penjelasan)
9. Tandai kolom pilih pada output yang diisi
10. Klik Simpan

Periode	Nama Output	Anggaran		Data Integrasi Capaian Keluaran			Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran	Koreksi			Status	Pilih
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Target Volume Keluaran (TVK)	Realisasi Volume Keluaran (RVK) Bulan Ini	Progres (%)		Keterangan	Koreksi RVK (Volume)	Koreksi Progress (%)		
Des	1705.902 Laporan Pelaksanaan Kerja Sama di Daerah (Lakera)	369.164.000	2.018.900	279,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	0,00	0,00		1	<input type="checkbox"/>
Des	1705.903 Laporan Keuangan Tingkat Rumah SDR (Laporan)	71.650.000	0	12,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	0,00	0,00		1	<input type="checkbox"/>
Des	1705.951 Layanan Internal (Overhead) (Layanan)	549.384.000	97.229.800	1,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	0,00	0,00		1	<input type="checkbox"/>
Des	1705.994 Layanan Perantara (Layanan)	1.815.427.000	117.318.500	1,00	0,00	0,00	<input type="button" value="Setuju"/> <input type="button" value="Tidak"/>	0,00	0,00		1	<input type="checkbox"/>

8. Untuk mengisi IKK, pengguna mengklik menu "Entri Data" (panel atas), pilih sub menu Indikator Keluaran Kegiatan pada drop down list;

9. Pengguna mengklik kolom entri

1. Pilih Menu Entri Data
2. Pilih Sub Menu Indikator Keluaran Kegiatan
3. Klik Kolom Entri

Total ada 8 Record

No.	Program	Kegiatan	Entri
1.	015.03 07.Program Pengelolaan Anggaran Negara	1851 Penyusunan Rancangan APBN	<input type="button" value="Entri"/>
-		1652 Pengelolaan PNB dan Subsidi Energi	<input type="button" value="Entri"/>
-		1853 Pengembangan Sistem Penganggaran	<input type="button" value="Entri"/>
-		1854 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Anggaran	<input type="button" value="Entri"/>
-		5095 Harmonisasi Peraturan Penganggaran	<input type="button" value="Entri"/>
-		4994 Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Perekonomian dan Kemitraan	<input type="button" value="Entri"/>
-		4995 Perencanaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<input type="button" value="Entri"/>
-		4996	<input type="button" value="Entri"/>

10. Pengguna mengisi Target IKK Tahunan dan Akumulasi Persentase Realisasi IKK (0-100%);

No.	Periode	Nama Output		(TIKK)	(RIKK)		Status	Pilih
1.	Semester I	1551.001 Dokumen RUU APBN dan RUU APBN-P beserta Note Keuangan dan Laporan Semester (indeks)	Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RAPBN dan Note Keuangan	0	0.00		!	<input type="checkbox"/>
2.	Semester I	1551.001 Dokumen RUU APBN dan RUU APBN-P beserta Note Keuangan dan Laporan Semester (indeks)	Indeks Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RAPBN-P dan Note Keuangan	0	0.00		✓	<input type="checkbox"/>
3.	Semester I	1551.001 Dokumen RUU APBN dan RUU APBN-P beserta Note Keuangan dan Laporan Semester (indeks)	Indeks ketepatan waktu penyusunan dokumen Laporan Semester Pelaksanaan APBN	0	0.00		!	<input type="checkbox"/>

4. Pilih Semester I atau II
5. Isi Target Indikator Keluaran Kegiatan Tahunan
6. Isi Akumulasi Persentase Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (0-100%)
7. Isi Keterangan
8. Tandai kolom pilih
9. Klik Simpan

*Persentase realisasi IKK dihitung secara akumulasi. Pada semester I diisi dengan persentase realisasi dari bulan Januari – Juni, Semester II diisi dengan persentase realisasi dari Januari - Desember

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

LAPORAN ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

Volume Target (1) ----- Sesuai DIPA (misal 100)	Satuan (2) ----- Perusahaan	Alokasi Anggaran Belanja Modal (3) ----- 	Beban Belanja Modal (4) ----- Rupiah Murni
Jenis Komponen (5) ----- Utama			
Jenis Kewenangan (6) ----- 		Alokasi Anggaran Belanja Barang (7) ----- 	Beban Belanja Barang (8) ----- Rupiah Murni

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (9)

Relisasi Anggaran Belanja Barang (10)

Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial (11)

Permasalahan (12)

Keterangan Permasalahan (13)

Status Pelaksanaan (14)

Dokumen Pendukung [URL] (15)

Keterangan Status Pelaksanaan (16)

Video Pendukung [URL] (17)

Gambar Pendukung [URL] (18)

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

1. Menginput data laporan pelaksanaan pembangunan nasional Triwulan I, II, III atau IV pada aplikasi e-Monev Ver.3;
2. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui link aplikasi e-Monev Ver.3 sebagai berikut (<http://e-monev.bappenas.go.id/emon3>);
3. Pengguna dapat login dengan cara mengklik tombol “login” dihalaman depan menggunakan username dan password sebagai berikut
Username: K5_065.01.06.24 Pasword : pas5word;
4. Pengguna mengklik menu “Pemantauan” (panel bagian kiri);
5. Pengguna mengklik menu ”Satker/Komponen” (panel bagian kiri);
6. Pengguna mengisi data realisasi (panel bagian bawah) dengan mengklik ”Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV” pada kolom NOMENKLATUR KEGIATAN.

The screenshot shows the e-Monev application interface. The top navigation bar is blue with the e-MONEV logo and the title "2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN". The left sidebar contains a menu with options: Beranda, Pemantauan (selected), Satker / Komponen, Output, Indikator OK, Indikator KK, Pratinjau Laporan, Cetak Laporan, and Evaluasi. The main content area is divided into two sections: "INFORMASI" and "KEGIATAN".

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : [065] - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
UNIT KERJA ESELON I : [01] - Badan Koordinasi Penanaman Modal
PROGRAM : [06] - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
UNIT KERJA ESELON II : [24] - Direktorat Wilayah IV

KEGIATAN

NO	KODE	NOMENKLATUR KEGIATAN	TRIWULAN				#	
			I	II	III	IV		
1	3229	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	← Data Realisasi	!	!	!	!	

* Klik untuk lihat detail

7. Pengguna mengklik nama masing-masing nomenklatur perangkat daerah pada kolom NAMA SATKER (panel bagian bawah).

The screenshot shows the MONEV system interface. The top navigation bar includes the MONEV logo and the title '2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN'. The left sidebar contains a menu with options like 'Beranda', 'Pemantauan', 'Satker / Komponen', 'Output', 'Indikator OK', 'Indikator KK', 'Pratinjau Laporan', 'Cetak Laporan', and 'Evaluasi'. The main content area is divided into 'INFORMASI' and 'SATUAN KERJA' sections. The 'INFORMASI' section displays details for the year 2018, including the ministry, unit, program, and activity. The 'SATUAN KERJA' section contains a table with columns for 'NO', 'KODE', 'NAMA SATKER', 'TRIWULAN' (I, II, III, IV), and '#'. A red box highlights the 'NAMA SATKER' column, and a red arrow points to the first row, which is labeled 'Nama Perangkat Daerah'.

NO	KODE	NAMA SATKER	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	029002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) PROVINSI JAWA BARAT	!	!	!	!	
2	039002	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH	!	!	!	!	

8. Pengguna mengklik "Tanpa Sub Output" pada menu NOMENKLATUR SUB OUTPUT;

The screenshot shows the MONEV system interface. The top navigation bar includes the MONEV logo and the title '2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN'. The left sidebar contains a menu with options like 'Beranda', 'Pemantauan', 'Satker / Komponen', 'Output', 'Indikator OK', 'Indikator KK', 'Pratinjau Laporan', 'Cetak Laporan', and 'Evaluasi'. The main content area is divided into 'INFORMASI' and 'SUB OUTPUT' sections. The 'INFORMASI' section displays details for the year 2018, including the ministry, unit, program, and activity. The 'SUB OUTPUT' section contains a table with columns for 'NO', 'KODE', 'NOMENKLATUR SUB OUTPUT', 'TRIWULAN' (I, II, III, IV), and '#'. A red arrow points to the first row, which is labeled 'Tanpa Sub Output'.

NO	KODE	NOMENKLATUR SUB OUTPUT	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	3229.021.001	Tanpa Sub Output	!	!	!	!	

* Klik untuk lihat detail

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PETUNJUK PELAKSANAAN

Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Belanja Barang dipergunakan untuk:

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Satuan Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal.

Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:

- a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- b. Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja
pertanggungjawaban berupa: SK Pengelola pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
 - Gol. I dan II : 0%
 - Gol III : 5%
 - Gol IV : 15%
- c. Belanja Barang Persediaan Konsumsi
 - Pengadaan ATK/komputer suplai dilengkapi dengan kuitansi bermeterai yang ditantangani oleh penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

- Faktur Pembelian
 - Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
 - a. Nilai kuitansi Rp 1 jt s/d Rp 2 jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp 2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1.5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- d. Belanja Bahan
- 1) Konsumsi rapat, pertanggungjawaban berupa: lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, dan

Pembelian makanan siap saji di restoran/rumah makan tidak dikenakan PPN, apabila pembelian dengan nilai kuitansi di atas 2 juta rupiah. Dikenakan pajak PPh Pasal 23 (jasa) sebesar 2% bila memiliki NPWP, dan 4% bila tidak memiliki NPWP.

 - 2) Penggandaan dan penjiilidan
 - Kuitansi bermeterai yang ditandatangani oleh penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Faktur Pembelian
 - Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
 - a. Nilai kuitansi Rp1jt s/d Rp2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1.5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- e. Belanja Sewa
- Bahwa dalam rangka pemantauan dengan menggunakan sistem LKPM Online diperlukan koneksi bandwidth minimal 2 Mbps. Pengelola Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dapat memastikan ketersediaan/kebutuhan sesuai dengan spesifikasi. Apabila telah terdapat langganan internet yang dibiayai oleh APBD yang memenuhi spesifikasi (2 Mbps), maka belanja sewa ini tidak dapat dipergunakan.
 - Pertanggungjawaban dan pengadaan sewa jaringan internet (disarankan menggunakan *e-catalog* di website <https://e-katalog.lkpp.go.id/>).
- f. Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan

pertanggungjawaban berupa: SK Kegiatan pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:

- Gol. I dan II : 0%
- Gol III : 5%
- Gol IV : 15%

g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- 1) Pelaksanaan kegiatan rapat dalam kota bertempat di Kantor Pemerintah Daerah dan melibatkan minimal 5 Instansi Teknis Lainnya. Keikutsertaan panitia Pemerintah Provinsi maksimal 10% dari jumlah peserta.
- 2) Pelaksanaan dapat dilakukan di hotel, apabila tidak ada kantor/ruang pemerintahan yang tersedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur dengan melengkapi Surat Pernyataan (sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013) ditandatangani oleh Kepala Dinas/Kantor.
- 3) Menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan.
- 4) Laporan Kegiatan dengan dilengkapi antara lain Surat Tugas, Undangan, Daftar Absensi, Daftar Transport Peserta, Daftar Uang Saku.

h. Belanja Perjalanan Biasa

Kelengkapan berupa:

- 1) Surat Tugas.
- 2) SPPD.
- 3) Bukti Transportasi Udara berupa tiket dan *boarding pass* (asli) dan/atau Bukti Transportasi Darat berupa tiket/kuitansi dari travel agent/penyedia moda transportasi dan/atau Bukti Transportasi Laut berupa tiket/kuitansi.
- 4) Tagihan penginapan/hotel.
- 5) Daftar pengeluaran riil (apabila ada), berdasarkan SBM tahun berjalan.
- 6) Laporan kegiatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN REVISI DAN
MATRIKS SEMULA-MENJADI

a. Bentuk Surat Usulan Revisi

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor : 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat,
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Di
Jakarta

1. Dasar Hukum:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...;
 - b. (diisi dengan dasar hukum lainnya seperti UU, PP, Perpres, keputusan sidang kabinet, keputusan rapat, dll)....;
 - c. DIPA Petikan No ... Tanggal kode *Digital Stamp* ...;
 - d. DIPA Petikan No ... Tanggal kode *Digital Stamp* ...;
(pengesahan revisi);
2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:
 - a.;
 - b.;

3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
Kategori revisi(diisi dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan);
4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut di atas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks semula-menjadi sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. ... (diisi dengan dokumen pendukung lainnya)

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Dinas...(diisi dengan Satker)

Nama...(Kepala ...).....

NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Matriks Semula-Menjadi

MATRIKS SEMULA-MENJADI
SATUAN KERJA

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
A. Satker		(kode <i>Digital Stamp</i>)		
1	Program			
2	Kegiatan			
3	Keluaran (Output)			
	<ul style="list-style-type: none">▪ Volume▪ Rupiah			
		Rp	Rp	Rp

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BENTUK SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN REVISI ANGGARAN

KOP SURAT BKPM

Nomor : /A.9/B.4/20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat

Kepala ... (Nama Satuan Kerja)

Di

Tempat

1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat ... (nama lembaga) Nomor ... tanggal dengan rincian:
 - a. Lingkup tentang perubahan

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

 - 1) Satuan Kerja(nama lembaga)..... untuk kegiatan Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan penambahan pagu anggaran pada Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
3. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
4. Dengan ini menyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat/tidak dapat disetujui dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal,

.....

Tembusan:

1. Gubernur
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BAHLIL LAHADALIA